



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENJUALAN KRI TELUK SAMPIT 515 DAN KOMITMEN MODERNISASI ALUTSISTA

Aulia Fitri

Peneliti Pertama
aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

DPR RI menyetujui rencana penjualan kapal perang milik TNI Angkatan Laut (AL), KRI Teluk Sampit 515 pada rapat Paripurna 29 Maret 2022. Keputusan untuk menjual KRI Teluk Sampit 515 datang dari Pemerintah karena kapal tersebut sudah tidak dapat difungsikan sebagai alutsista TNI AL. Proses penjualan kapal akan dilakukan melalui lelang utuh secara terbuka sehingga terdapat transparansi penjualan aset barang milik negara (BMN).

Sebelumnya, pada Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Staf AL pada 25 Maret 2022, Komisi I DPR RI menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Sampit-515 dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Sampit 515 pada Kemenhan sesuai dengan Surat Presiden RI Nomor R-57/Pres/12/2021 perihal permohonan persetujuan penjualan BMN berupa penjualan kapal eks KRI Teluk Sampit 515 pada Kemenhan dan dijalankan sesuai peraturan perundangan-undangan.

Nilai perolehan KRI Teluk Sampit 515 pada tahun 1978 mencapai Rp173 miliar. Merujuk pada Permenhan Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, kapal yang sebelumnya merupakan bagian dari alutsista TNI tersebut merupakan kategori BMN yang penjualannya harus melalui persetujuan DPR. Penjualan KRI Teluk Sampit 515 akan dilakukan di Dermaga Koarmada II Surabaya, dan hasilnya akan masuk ke kas negara. Dengan kondisi material yang rusak berat, taksiran nilai penjualan untuk kapal ini berada di kisaran Rp740 juta.

KRI Teluk Sampit 515 saat ini sudah kehilangan hampir seluruh fungsinya, baik dari sistem permesinan, kelistrikan, peralatan navigasi, komunikasi hingga instrumen anjungan kapal yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Secara keseluruhan, kondisi kapal berjenis *landing ship tank* (LST) itu sudah rusak berat dan tidak layak pakai. Selain itu, dari sisi ekonomis, kapal tersebut sudah tidak dapat lagi diperbaiki. Jika tidak segera dihapuskan sebagai BMN, akan terjadi penurunan nilai barang dan mengurangi ketersediaan tempat sandar kapal di dermaga.

Usulan untuk menjual alutsista yang sudah tidak berfungsi dapat dilihat sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi kesiapan alutsista TNI dalam menjalankan operasinya. Selain itu, Pemerintah juga perlu lebih serius dalam menjamin alur hidup alutsista TNI mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan hingga tahap purna pakai atau disposal. Kondisi alutsista TNI saat ini rata-rata usia pakainya mencapai antara 25 hingga 40 tahun. Selain mempengaruhi tingkat kesiapan operasional, selain mempengaruhi tingkat kesiapan operasional, juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Pada tahun 2015-2021 terdapat total 16 kejadian kecelakaan alutsista mulai dari pesawat dan helikopter jatuh hingga kapal tenggelam. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Kemenhan bahwa saat ini lebih dari 50% senjata TNI tidak hanya tua tetapi juga tidak dapat dioperasikan. Kondisi ini akan menyebabkan risiko kegagalan serta biaya pemeliharaan dan operasional alutsista meningkat.

Upaya untuk melakukan modernisasi alutsista TNI, khususnya melalui program *Minimum Essential Forces (MEF)*, secara bertahap telah membuahkan hasil meskipun belum maksimal. Kemenhan juga telah memperbaharui komitmen modernisasi alutsista melalui Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kemenhan dan TNI Tahun 2020-2024. Kerja sama pertahanan dalam pengadaan alutsista modern pun kian gencar dilakukan oleh Kemenhan, misalnya pembelian 42 unit jet tempur *Dassault Rafale* yang dilakukan beberapa bulan lalu.

Serangkaian upaya tersebut tentu layak diapresiasi, walaupun perlu diakui pula bahwa kebutuhan alutsista TNI belum dapat terpenuhi secara maksimal. *Stakeholders* terkait perlu terus mendorong Pemerintah untuk efektif dalam pemenuhan MEF. Dalam hal ini, terutama untuk menggunakan produk dalam negeri, melaksanakan modernisasi alutsista melalui program penelitian dan pengembangan persenjataan militer, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista. Komitmen modernisasi alutsista menjadi penting karena menyangkut kepentingan nasional dan keselamatan bangsa. Modernisasi perlu mempertimbangkan fakta bahwa operasi masa kini dan masa depan akan semakin mengandalkan interoperabilitas dengan tuntutan operasional yang semakin meningkat, yang belum dapat dipenuhi oleh TNI dalam kondisi dan posturnya saat ini.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Mabes TNI untuk mengevaluasi kondisi alutsista TNI di tiap-tiap matra, sehingga kualitas operasional tetap terjaga serta mencegah terjadinya kerugian atau potensi kecelakaan alutsista ke depannya. Komisi I juga dapat mengusulkan hasil pelelangan alutsista yang sudah tidak berfungsi dipergunakan kembali untuk pemeliharaan alutsista TNI. Komisi I dapat mendorong Kemenhan untuk terus mendukung modernisasi alutsista TNI sesuai dengan *threat based* dan *capability based* dengan memperhatikan kemampuan anggaran. Selain itu, Komisi I juga perlu menekankan pentingnya komitmen pemeliharaan alutsista mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, hingga tahap purna pakai (disposal) dari alutsista TNI, kepada para *stakeholders* terkait yaitu Kemenhan dan Mabes TNI. Komisi I juga perlu mendorong Kemenhan untuk dapat memaksimalkan diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat, khususnya dalam kerja sama pengadaan dan pembangunan alutsista dimana Indonesia dapat memanfaatkan skema alih teknologi untuk meningkatkan kapabilitas SDM TNI serta Industri Pertahanan dalam negeri.

Sumber

cnn.indonesia.com, 26 Maret 2022
 detiknews.com, 29 Maret 2022
 Kompas.com, 29 Maret 2022
 Raker Komisi I DPR RI, 25 Maret 2022
 Rapat Paripurna DPR RI, 29 Maret 2022
 tempo.co, 29 Maret 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdu Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
 Juli Panglima S.
 Sri Nurhayati Q.
 Dian Cahyaningrum
 Rafika Sari
 Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
 Nur Sholikh P.S.
 Fieka Nurul A.